

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**Oleh:****Mei Nanda Maulida,**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Email : meinandamaulida123@gmail.com

Imawati Yousida

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Email: yousidabungas@gmail.com

Tina Lestari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia (STIE) Banjarmasin

Email: lestari.tn@gmail.com

Article Info*Article History :**Received 16 Agustus - 2022**Accepted 25 Agustus - 2022**Available Online**30 September - 2022***Abstract**

This study aims to determine the Financial Management that has been applied to the Family Economic Empowerment Program of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) of South Kalimantan Province so far. The secondary data source of this research is data from the BKKBN of South Kalimantan Province. While the primary data of this study were obtained from direct observation by distributing questionnaires and interviews, as well as documentation to UPPKA who are members of the family economic empowerment program. The method of analysis in this research is to use Field Research data processing and analysis. The data processing process was analyzed qualitatively through several stages from the data that had been collected, compiled beforehand based on data obtained from the BKKBN of South Kalimantan Province, and from the results of questionnaires, interviews, and documentation. Based on the analysis results show that financial management in the family economic empowerment program has not been implemented optimally. There are still elements whose application is low because the UPPKA who are members of this family economic empowerment program experience obstacles in their implementation. The item that is most widely applied is the planning element, while the lowest is the reporting element.

Keyword :

*Financial Management,
Family Economic
Empowerment Program,
Planning, Reporting*

1. PENDAHULUAN

Kondisi kependudukan saat ini baik dalam arti jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam upaya meninjau efektivitas pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga maka pemerintah bersama dengan BKKBN menciptakan suatu program yang dinamakan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan agar keluarga memiliki kemandirian

ekonomi dan keuangan menuju keharmonisan dan kebahagiaan hidup berkeluarga.

Program keluarga berencana Nasional tak hanya menjalankan program KB guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKA. UPPKA merupakan usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga aspek yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Sasaran UPPKA adalah seluruh anggota keluarga akseptor dan keluarga rentan yang meliputi pasangan usia subur, remaja, lansia, dan atau anggota keluarga yang berkeinginan menjadi akseptor. Program UPPKA sangatlah penting keberadaannya karena usaha ini membina agar dapat mendapatkan penghasilan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk diolah dan dikelola menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Karena selain menambah pendapatan bagi keluarganya, penciptaan usaha melalui UPPKA juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

UPPKA memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja di dalamnya, salah satunya adalah melaksanakan administrasi dan keuangan kelompok. Namun, terdapat keterbatasan pengetahuan para anggota kelompok UPPKA dalam pengelolaan keuangan sehingga mempengaruhi dalam kinerja UPPKA tersebut. UPPKA adalah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga akseptor. Dalam upaya pemberdayaan ini sangat penting dilakukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan tidaklah hanya untuk memaksimalkan laba melainkan untuk meminimumkan biaya hal ini dikarenakan melalui pengelolaan yang baik diharapkan mampu menekan biaya-biaya yang mungkin timbul dari kegiatan usaha. Selain itu, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan usaha baik saat ini maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori stakeholder dalam perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi

oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder di perusahaan tersebut. Untuk tanggung jawab perusahaan diukur sebagai indikator ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dukungan dari para stakeholder (Pramesti, 2021). Teori stakeholder akan membuat perusahaan berusaha untuk memuaskan stakeholder agar tetap bertahan, yaitu dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh berdasarkan dari pencatatan keuangan yang dilakukan di mana dalam pencatatan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh suatu usaha apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan untuk mengetahui perjalanan bisnisnya, kendala-kendala apa saja yang dialami, dan informasi yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Teori Legitimasi menurut Sukasih dan Sugiyono (2017), teori legitimasi menyakini suatu gagasan bahwa terdapat “kontrak sosial” antara organisasi dengan lingkungan. Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan lingkungan dan sosial menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan adanya pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik dan memiliki daya tarik dalam penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan berupaya untuk membangun strategi dalam hal yang berkaitan terhadap penempatan posisi agar berada pada lingkungan masyarakat dimana aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar. Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan pelaporan terkait aktivitas perusahaan apabila manajemen menanggapi bahwa pelaporan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Teori legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensi bagi perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, BKKBN berharap agar aktivitas usaha yang dijalankan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga dapat berjalan dengan lancar.

Program pemberdayaan ekonomi keluarga harus mengungkapkan aktivitas usaha dengan menunjukkan bahwa aktivitas UPPKA telah beroperasi secara baik dengan nilai sosial yang ada. Dalam hal ini, program pemberdayaan ekonomi keluarga dapat diterima dengan baik dengan masyarakat sehingga dapat menjamin keberlangsungan program ini.

Teori keagenan merupakan suatu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan prinsipal memberikan wewenang kepada agen mengenai tentang pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban (Purnomo, 2021).

Dilihat dari sudut pengelolaan keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan lembaga yang memberikan dan meminjamkan dana sehingga memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis yang digunakan selama ini. Para kader UPPKA yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga diberikan kekuasaan oleh BKKBN untuk membuat keputusan dalam usaha yang mereka jalankan agar dapat memaksimalkan laba yang diperoleh dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Pengelolaan Keuangan menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian.

Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi suatu cerminan keberdayaan ekonomi masyarakat maupun bangsa. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memantapkan keberhasilan Program Keluarga Berencana. Salah satu langkah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu membentuk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Nama UPPKA) sudah muncul di pertengahan tahun 1980-an. Setelah lahirnya UU nomor 10

tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UPPKA berubah nama menjadi kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan sasaran yang lebih luas yaitu keluarga akseptor dan bukan akseptor. Seiring dengan dinamika program KB yang diperbaharui menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dengan keterbatasan permodalan dan kewenaga, BKKBN pada tahun 2020 mengembalikan nomenklatur UPPKS menjadi UPPKA berdasarkan Peraturan BKKBN No.17 tahun 2020 tentang pengelolaan Kelompok UPPKA.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (users) untuk pengambilan keputusan. Berikut merupakan tahapan siklus akuntansi:



Gambar-1: Siklus Akuntansi

Sumber: Hery.(2015). Akuntansi Dasar 1 dan 2.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para kelompok UPPKA yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pengumpulan data dengan langsung ketempat objek penelitian dengan cara Field Reaserch terbagi menjadi 3 tahapan yaitu sebagai berikut: (1) Observasi, suatu pengamatan atas aktivitas beberapa UPPKA di Kota Banjarmasin sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana pengelolaan keuangan yang telah diterapkan. (2) Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dibahas, untuk memperoleh data tentang pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga. (3) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah data selesai dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data.

Proses pengolahan data dianalisis secara statistik kualitatif melalui beberapa tahapan dari data-data yang telah dikumpulkan, disusun terlebih dahulu, setelah itu dilihat berdasarkan hasil kuesioner, dimana dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat penerapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok UPPKA di Kota Banjarmasin yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pengelolaan keuangan adalah suatu aksi untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada masa yang akan datang, dan digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi pribadi, keluarga maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga mempunyai tujuan agar mencapai kesuksesan dalam keuangan. Pada penelitian ini dilakukan analisis pengelolaan keuangan melalui 4 unsur yaitu unsur perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Untuk mengetahui penerapan mengenai 4 unsur tersebut dilakukan observasi, wawancara, serta pembagian kuesioner kepada kelompok UPPKA yang menjadi sample dalam penelitian ini.

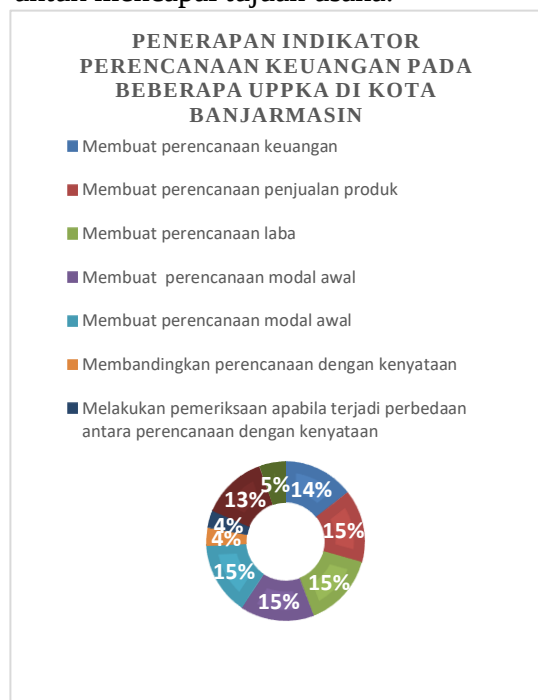
Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan suatu proses atau kegiatan agar keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi (bekerja atau berusaha). Salah satu langkah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu membentuk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). BKKBN pada tahun 2020 mengembalikan nomenklatur UPPKS menjadi UPPKA berdasarkan Peraturan BKKBN No.17 tahun 2020 tentang pengelolaan Kelompok UPPKA dengan tujuan untuk lebih fokus pada pelestarian kesertaan KB dan memudahkan untuk melakukan pemantauan lapangan, serta diharapkan

kesejahteraan akseptor KB bisa ditingkatkan dan menjadi pemicu penggunaan kontrasepsi modern dan berjangka panjang.

Akuntansi menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehingga tersaji informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi keuangan tersebut menjadi media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja suatu usaha pada suatu periode, sehingga memiliki kemungkinan untuk memilih alternatif yang terbaik untuk kemajuan usaha yang dijalankan.

4. HASIL PEMBAHASAN

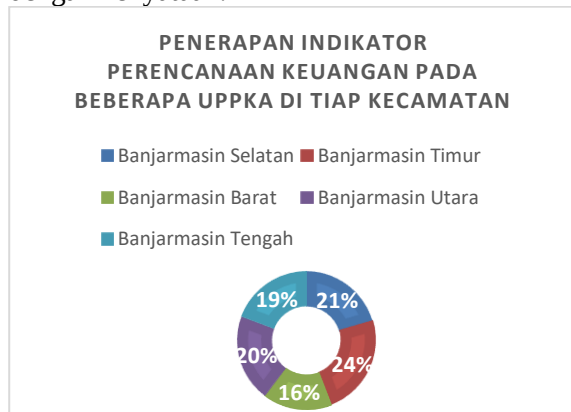
Pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu pada UPPKA di Kota Banjarmasin dapat dilihat melalui 4 (empat) indikator yakni perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian: (1) Perencanaan yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dengan memilih cara untuk mencapai tujuan usaha.



Gambar-2 Penerapan Indikator Perencanaan keuangan Pada beberapa UPPKA di Kota Banjarmasin

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat bahwa item pernyataan perencanaan keuangan yang telah banyak diterapkan oleh para kelompok UPPKA yakni membuat perencanaan dalam penjualan produk, membuat perencanaan laba, serta membuat

perencanaan modal awal sebelum memulai usaha. Item yang paling rendah diterapkan oleh kelompok UPPKA yakni membandingkan perencanaan dengan kenyataan, serta melakukan evaluasi apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dengan kenyataan.



Gambar-3 Penerapan Indikator Perencanaan Keuangan pada UPPKA Di Tiap Kecamatan

Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa penerapan indikator perencanaan keuangan di posisi pertama yakni pada Kecamatan Banjarmasin Timur. Karena berdasarkan hasil kuesioner bahwa mereka telah menerapkan perencanaan keuangan dengan baik. Terbukti dengan adanya perencanaan yang mereka buat dalam penjualan produk, serta merencanakan berapa laba yang akan mereka dapatkan dari penjualan produk tersebut. Kemudian, tidak lupa mereka merencanakan modal awal untuk memulai usahanya. Sedangkan pada Kecamatan Banjarmasin Barat menempati posisi terendah dalam penerapan perencanaan keuangan. (2) Pencatatan atau pembukuan adalah kegiatan dalam akuntansi yaitu mencatat transaksi harian (Andreas, 2011).

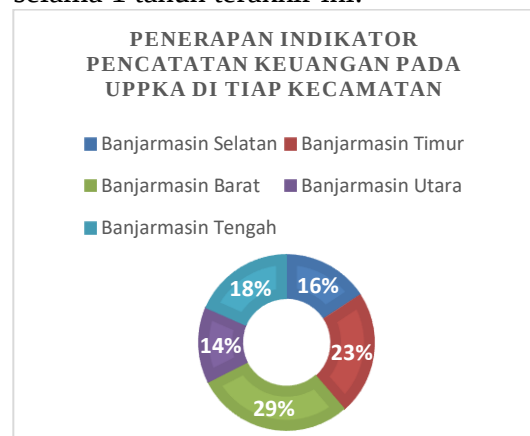


Gambar-4 Penerapan Indikator Pencatatan keuangan Pada beberapa uppka di Kota Banjarmasin

Pada grafik di atas, dapat kita lihat penerapan yang tertinggi yaitu pada item pencatatan

penjualan yang dilakukan secara tertulis. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti pencatatan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual yakni secara tertulis, tidak menggunakan sistem aplikasi.

Selanjutnya, item yang masih sedikit diterapkan yaitu rutinitas melakukan pencatatan transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Hal ini dikarenakan sebagian UPPKA hanya melakukan pencatatan pada waktu luang saja, dan apabila mereka ingat. Bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan selama 1 tahun terakhir ini.



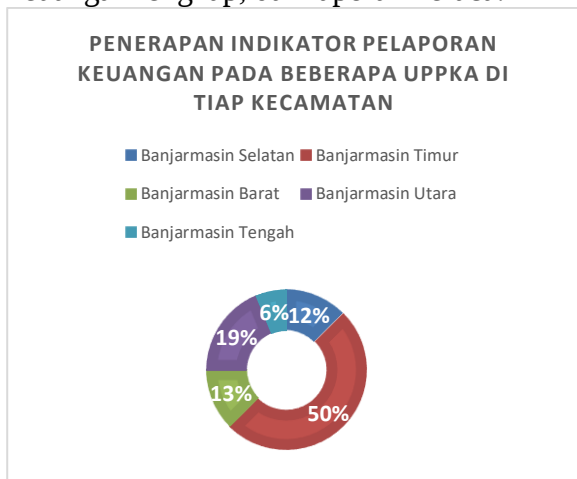
Gambar-5 Penerapan Indikator Pencatatan keuangan Pada UPPKA Di Tiap Kecamatan Berdasarkan grafik tersebut, penerapan indikator pencatatan keuangan telah banyak diterapkan oleh UPPKA di Banjarmasin Barat. Sedangkan yang paling sedikit menerapkan pencatatan keuangan dalam usahanya yakni di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada wilayah ini kebanyakan dari mereka kurang sadar pentingnya melakukan pencatatan keuangan.

(3) Pelaporan berarti laporan yang dibuat tidak hanya sekedar angka-angka tetapi memiliki informasi (Kuswadi, 2005). Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu usaha, dan ditujukan kepada pemakai laporan keuangan.



Gambar-6 Penerapan Indikator Pelaporan keuangan Pada beberapa UPPKA di Kota Banjarmasin

Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa item terbanyak yang telah diterapkan oleh UPPKA dalam pelaporan keuangan yakni membuat laporan arus kas. Hal ini terbukti dengan adanya buku kas yang berisi pencatatan kas masuk ataupun keluar yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok UPPKA tersebut. Kemudian, item yang paling sedikit diterapkan yaitu membuat laporan keuangan lengkap, dan laporan neraca.

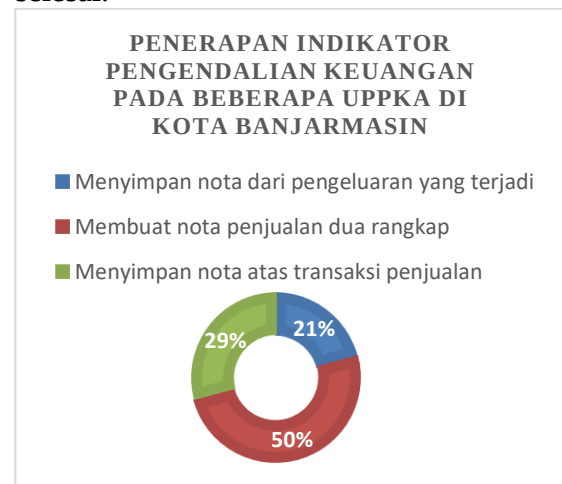


Gambar-7 Penerapan Indikator Pelaporan keuangan Pada beberapa UPPKA Di Tiap Kecamatan

Pada grafik di atas dapat kita lihat bahwa penerapan indikator pelaporan terbanyak yakni di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan yang paling rendah ialah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan hasil kuesioner, dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaporan keuangan sangat minim dilakukan oleh para

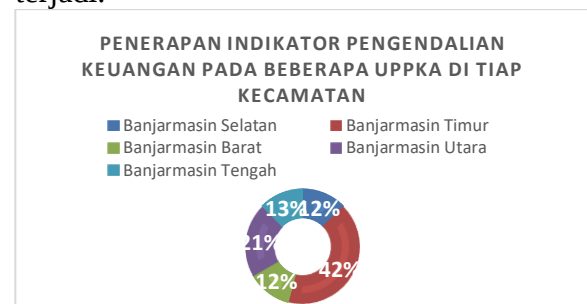
kelompok UPPKA. Karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai pelaporan keuangan yang baik dan benar. Tujuan dari adanya laporan keuangan ialah memberikan informasi terkait kinerja keuangan sehingga berguna untuk evaluasi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.

(4) Pengendalian adalah peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Handoko, 2011). Perencanaan yang disusun pada awal usaha, akan dievaluasi setelah pelaksanaan rencana selesai.



Gambar-8 Penerapan Indikator Pengendalian Keuangan Pada beberapa UPPKA di Kota Banjarmasin

Dapat kita lihat bahwa penerapan indikator pengendalian yang paling banyak adalah membuat nota penjualan dua rangkap. Kemudian, yang paling sedikit diterapkan yakni menyimpan nota dari pengeluaran yang terjadi.



Gambar-9 Penerapan Indikator Pengendalian Keuangan pada beberapa uppka Di Tiap Kecamatan

Dapat kita lihat bahwa wilayah Banjarmasin Timur sudah banyak menerapkan pengendalian keuangan. Sedangkan wilayah yang paling rendah dalam penerapan indikator

pengendalian yakni Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin.

Hambatan dan solusi dalam pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga, antara lain: (1) Unsur Perencanaan, hambatan dalam penerapan unsur perencanaan keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni kurang memahami bagaimana cara melakukan perbandingan dan evaluasi terhadap perencanaan yang dibuat dengan actual. Serta belum mempunyai dana yang bisa disisihkan untuk cadangan kas kelompok. Solusi dari hambatan dalam penerapan perencanaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga ialah perlunya dilakukan pelatihan ataupun sosialisasi mengenai cara membandingkan dan mengevaluasi perencanaan usaha yang telah dibuat dengan kenyataan yang terjadi. Karena melakukan evaluasi dan perbandingan tersebut sangat penting dilakukan agar tujuan dari rencana dapat tercapai dan dapat menilai apakah rencana yang dilakukan sudah baik atau belum. Jadi, apabila rencana sebelumnya kurang optimal, maka diperlukannya rencana yang kedua untuk memaksimalkan kinerja usaha dari UPPKA tersebut. (2) Unsur Pencatatan, hambatan dalam penerapan unsur pencatatan keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni kurangnya pengetahuan para kelompok UPPKA mengenai pentingnya dilakukan pencatatan atas segala transaksi yang terjadi di dalam sebuah usaha. Kurangnya kesadaran mereka untuk melakukan pencatatan keuangan tersebut. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pencatatan keuangan para kelompok UPPKA yakni saat terjadi pandemi virus CORONA yang menyebabkan usaha mereka menurun drastis, sehingga pencatatan keuangan tidak terlaksana dengan baik. Selain itu karena adanya musibah banjir, dan juga kebakaran yang menyebabkan buku pencatatan mereka rusak sehingga perlu waktu agar mereka bisa melakukan pencatatan kembali. Solusi dari hambatan tersebut adalah perlu diberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan keuangan. Karena sumber dana dan jenis penggunaan dana harus dicatat dengan tepat agar tidak terjadi penyelewengan dan ketidak-beresan dalam kinerja keuangan. Selain itu, perlunya perhatian khusus untuk

kelompok UPPKA mana yang masih berjalan dengan baik dan mana yang sudah tidak terkoordinir dengan semestinya. Untuk UPPKA yang sudah kurang terkoordinir agar bisa diberikan solusi terutama mengenai permodalan. Karena dengan adanya modal yang diberikan oleh pihak terkait (yang menangani program pemberdayaan ekonomi keluarga) sehingga dapat membuat UPPKA yang awalnya hampir mati menjadi tumbuh kembali. (3) Unsur Pelaporan, hambatan dalam penerapan unsur pelaporan keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni kurangnya pengetahuan para kelompok UPPKA bagaimana laporan keuangan yang lengkap dan seperti apa laporan neraca itu. Banyak dari mereka melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja, akan tetapi tidak sampai ditahap pembuatan laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai hal tersebut. Solusi dari hambatan tersebut yaitu perlu perhatian khusus kepada para UPPKA karena kebanyakan dari mereka kurang memahami mengenai pelaporan keuangan yang lengkap, baik, dan benar. Dengan adanya pelaporan keuangan yang baik dapat memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi usaha sekaligus dapat dijadikan inovasi untuk usaha kedepannya. Tidak perlu membuat laporan keuangan yang rumit, cukup dengan membuat laporan laba rugi dan laporan arus kas secara teratur (misal sebulan sekali). Dengan membuat kedua laporan tersebut dirasa sudah dapat memberikan efek yang baik dalam kelancaran usaha kedepannya. (4) Unsur Pengendalian, hambatan dalam penerapan unsur pengendalian keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni masih kurang menyadari pentingnya membuat dan mengarsipkan nota dari setiap pengeluaran dan transaksi penjualan yang terjadi. Sulitnya menemukan tempat di pasar tradisional yang menyediakan nota atas transaksi jual beli yang dilakukan. Kemudian, kurangnya kesadaran mereka mengenai pengarsipan nota penjualan, karena mereka hanya membuat nota untuk diserahkan ke pembeli, sehingga kebanyakan kelompok UPPKA tidak menyimpan nota tersebut sebagai arsip dalam pengendalian keuangan mereka.

Solusi dari hambatan tersebut yaitu perlunya para kelompok UPPKA terus membuat nota penjualan dua rangkap (baik penjualan dalam jumlah banyak ataupun sedikit, penjualan dalam jarak jauh ataupun dekat) salah satu nota diberikan untuk pembeli, dan satu nota lagi dijadikan sebagai arsip. Sehingga sinkronisasi data dapat akurat untuk pembuatan laporan keuangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Analisis pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik akan tetapi masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Terutama pada unsur pelaporan dan pengendalian. Penerapan indikator perencanaan (74%), indikator pencatatan (57%), indikator pengendalian (32%), dan indikator pelaporan (11%). Masih terdapat hambatan dalam pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada unsur perencanaan para kelompok UPPKA masih kurang memahami bagaimana cara melakukan perbandingan dan evaluasi terhadap perencanaan yang dibuat dengan aktual. Pada unsur pencatatan kurangnya kesadaran mereka untuk melakukan pencatatan keuangan. Kemudian, dalam unsur pelaporan kurangnya pengetahuan para kelompok UPPKA bagaimana laporan keuangan yang lengkap dan seperti apa laporan neraca itu. Terakhir, pada unsur pengendalian keuangan sulitnya menemukan tempat di pasar tradisional yang menyediakan nota atas transaksi jual beli yang dilakukan dan kurangnya kesadaran mereka mengenai pengarsipan nota penjualan.

6. REFERENSI

Hasibuan, A. F. (2015). Pemberdayaan UPPKS Cendrawasih Berbasis Pencatatan Keuangan di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 21 Nomor 81.

Hery. (2015). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT. Grasindo

Inayah, N. Jauhariyah, N, A. Ekaningsih, L, A, F. Ridwan, M, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume II Nomor 1.

Nasution, A. R. (2015). Pemberdayaan UPPKS Monalisa Berbasis Pencatatan Keuangan di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 21 Nomor 80

Puspitaningtyas, Z. (2017). Pembudayaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 03*.

Sitorus, M. A. (2018). Analisis Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 24 No. 3.

Tewal, B. Rimper, J, R, T, S.L. Herrari, M, Ch, P. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Bagi Wanita GBI Marina Plaza Manado*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.

Astuti, E, N. (2021). *Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Sejahtera Melalui Usaha Ekonomi Keluarga Di Kelompok UPPKA Maju Bersama Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi*.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (2019). *8 Langkah Tingkatkan Penghasilan Keluarga Menuju Ekonomi Kuat dan Mandiri*.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (2021). *Pedoman Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (2021). *Tatanan Hidup Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga*.